



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
K A B U P A T E N B R E B E S

**LHKPN KETUA & ANGGOTA  
PPID BAWASLU KABUPATEN BREBES**

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Desember 2023/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TRIO PAHLEVI  
2. Jabatan : KETUA  
3. NHK : 919837

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	8.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	8.000.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	6.900.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	22.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	36.900.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	37.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-100.000

## Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Desember 2023/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HADI ASFURI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 918900

**II. DATA HARTA**

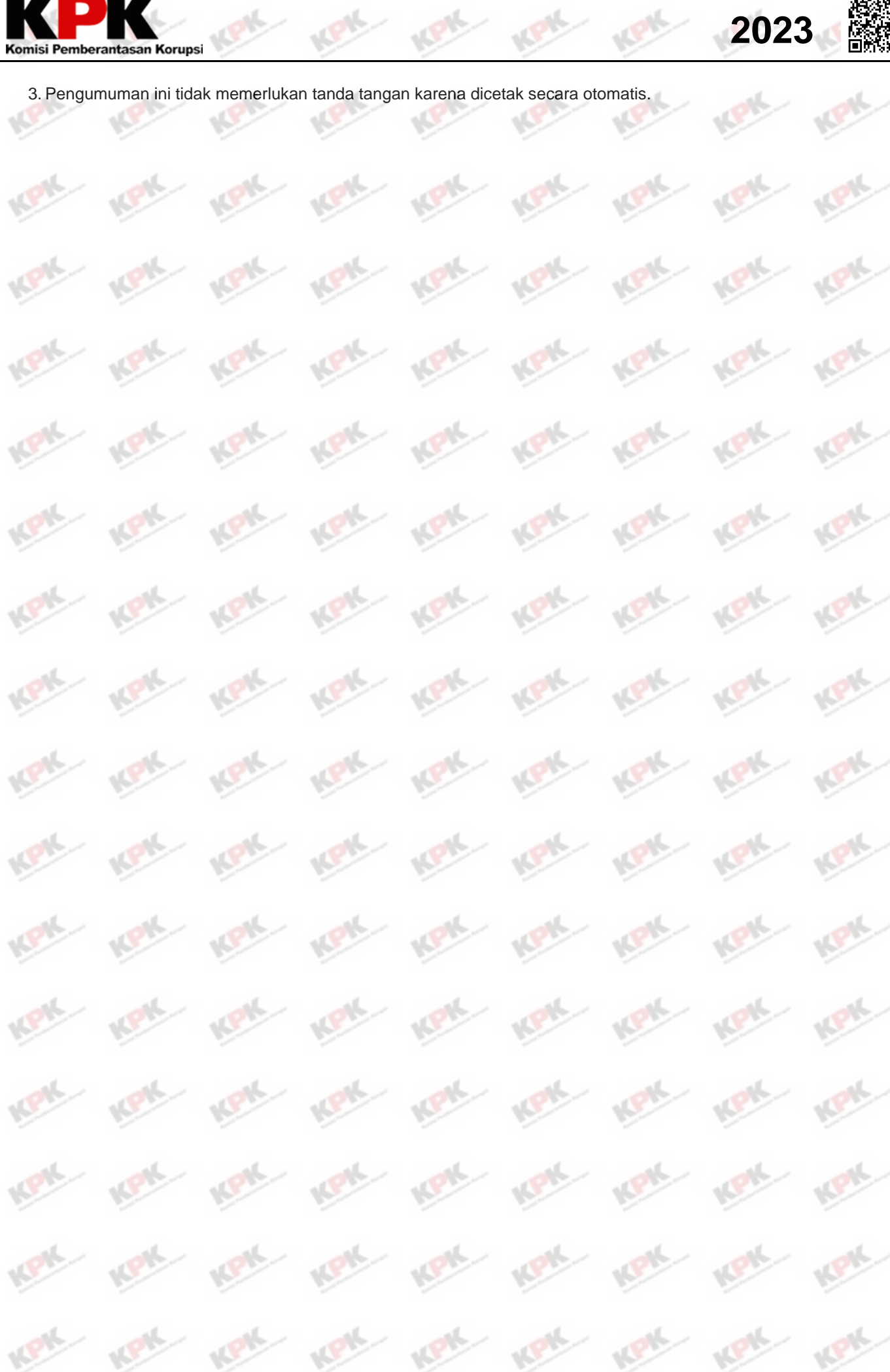
<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	1.100.000.000
1. Tanah Seluas 3430 m2 di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 400.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/200 m2 di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 700.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	3.500.000
1. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2008, WARISAN Rp. 3.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	14.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	32.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	1.149.500.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	---
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	1.149.500.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Desember 2023/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AMIR FUDIN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 919828

**II. DATA HARTA**

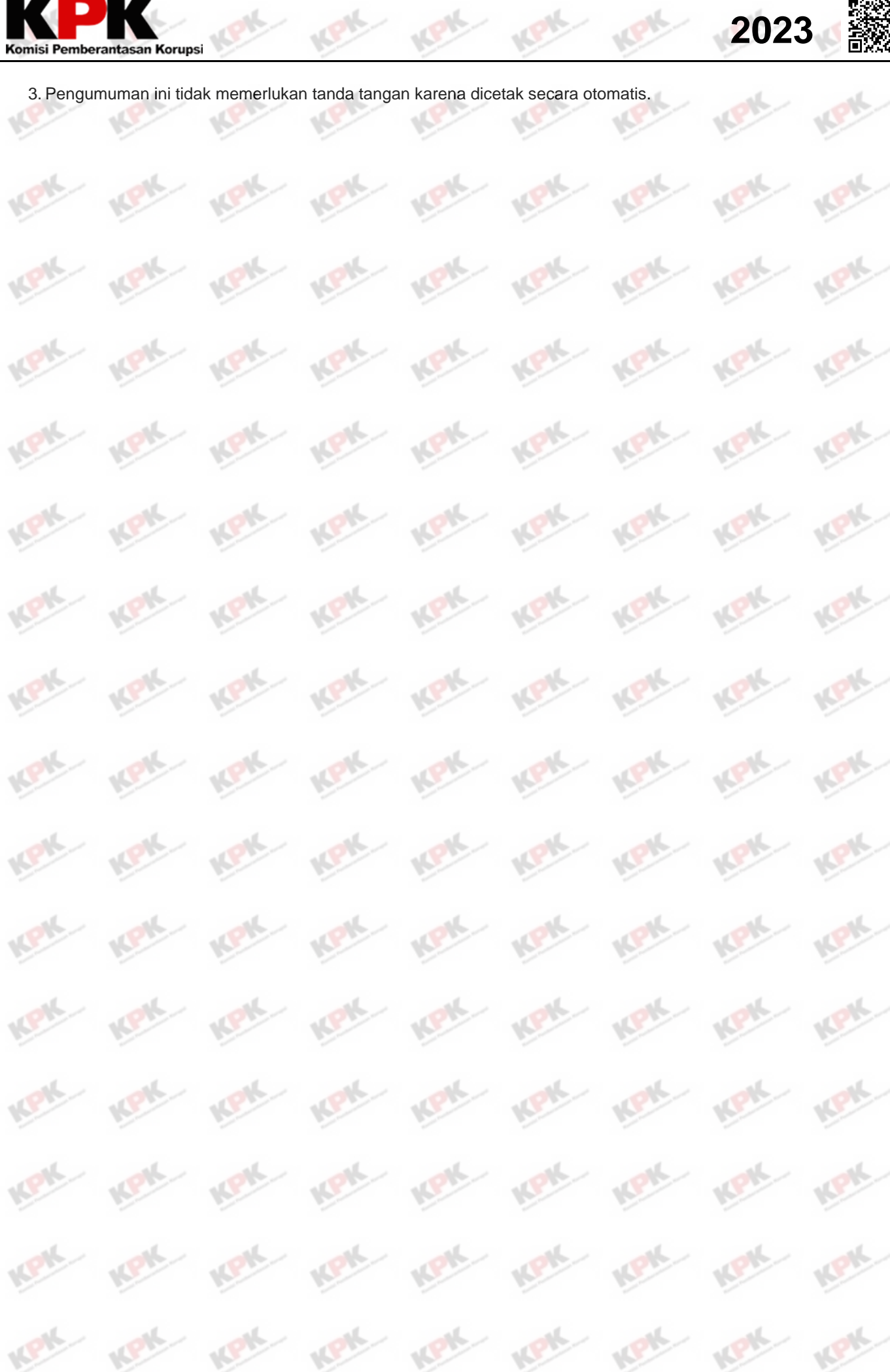
<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>310.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 333 m2/104 m2 di KAB / KOTA BREBES, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000		
2. Tanah Seluas 943 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>17.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA VARIO VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>16.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>2.800.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>345.800.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>14.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>331.800.000</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RUDI RAHARJO
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632920

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 649.500.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BREBES, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 3153 m2 di KAB / KOTA BREBES, HIBAH TANPA AKTA Rp. 258.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/64 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 191.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 187.500.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO RS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 21.882.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.345.321**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 860.227.321

**III. HUTANG** Rp. 107.947.061**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 752.280.260

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Kantor Kirim KC BREBES 52200  
Tanggal Posting 06-Dec-2023  
Wkt Posting : 10:57:28  
1x1x1 cm (0.001 KG)

ID Pelanggan



P2312060056770

Lacak detail di

PEPS / www.pelindo.com

Jenis kiriman Pos Reguler

KARNODO (BAWASLU  
KAB BREBES)

JL KH HASYIM ASYARI NO 2 KEL  
PASARBATANG KEC BREBES  
BREBES

Penerima  
**DIREKTORAT  
PENDAFTARAN DAN  
Pemeriksaan LHKPN**  
KOTA JAKARTA SELATAN, SETIA  
BUDI, KUNINGAN TIMUR

- A. Pernyataan pengirim
1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero)
  2. Isi Kiriman : DOKUMEN
  3. Nilai pertanggung jawaban isi kiriman Rp. 0
  4. Asuransi : Rp. 0
- B. Call Center 24/7 Hubungi 1500161



Berat : 0.1 KG  
Bea kirim : Rp. 12.000  
Asuransi : Rp. 0  
Diskon : Rp. 0  
Netto : Rp. 12.000  
Tarif sudah termasuk PPN

NPWP 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115

Daftar kekurangan kelengkapan yang harus diisi dan dilengkapi oleh Sdr. KARNODO (3329091801810011), ANGGOTA - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM:

JENIS	URAIAN
Surat Kuasa	Mohon dikirimkan ke KPK Lampiran IV Surat Kuasa yang dicetak dan ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000 atas nama: 1. KARNODO (Penyelenggara Negara)  (Jika sudah mengirimkan Surat Kuasa, maka koreksi atas Surat Kuasa ini dapat diabaikan, jika ada kesulitan silakan konfirmasi ke nomor telepon Call Center LHKPN 198)

Keterangan :

1. Jika terdapat kekurangan kelengkapan Surat Kuasa dalam **tabel daftar kekurangan kelengkapan di atas**, mohon Surat Kuasa dicetak melalui aplikasi e-Filing LHKPN dan ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000 oleh setiap nama yg disebutkan dalam uraian dan dikirimkan format aslinya ke alamat :

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi

Gedung Merah Putih KPK – Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950

2. Bagi yang melaporkan LHKPN dengan menggunakan aplikasi e-Filing LHKPN (*online*) daftar kekurangan (selain surat kuasa) dapat dilengkapi dan diperbaiki melalui melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id)
3. Wajib LHKPN mengirimkan kekurangan dokumen tersebut maksimal 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi oleh Wajib LHKPN. Dalam hal Wajib LHKPN belum menyampaikan dokumen sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Tim Verifikasi KPK